

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG PENURUNAN KASUS STUNTING DI
KOTA SURABAYA MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79
TAHUN 2022**

Laila Della Amanda, Ismail, Tri Prasetyowati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
lailadella09@gmail.com¹, ismail@ubhara.ac.id², triprasetyowati@ubhara.ac.id³

Abstrak

Kemiskinan memunculkan masalah baru pada kesehatan masyarakat yaitu kurangnya pemenuhan gizi pada anak menyebabkan stunting, stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di Kota Surabaya, untuk mengejar zero stunting pada tahun 2023, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada Camat dan Lurah agar melibatkan seluruh stakeholder. Penulisan ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi, Faktor yang mempengaruhi dan upaya apa yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang penurunan kasus stunting di Kota Surabaya. Penulisan dilaksanakan dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, lokasi penulisan di Kota Surabaya dengan empat lokasi sampling. Penulisan dilaksanakan dengan menggunakan acuan teoritis dari George C. Edward (Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi). Hasil penulisan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penurunan Kasus Stunting Di Kota Surabaya telah melalui proses komunikasi yang baik dengan ketersediaan sumberdaya yang cukup memadai, di dukung sikap positif dari para pelaksana kebijakan serta tersedia struktur birokrasi yang menjadi acuan utama sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penurunan Stunting, komunikasi, Sumberdaya, struktur birokrasi

Abstract

Poverty gives rise to new problems in public health, namely the lack of adequate nutrition for children causing stunting, stunting (short toddlers) is one of the crucial nutritional problems, especially in the city of Surabaya, to pursue zero stunting by 2023, the Mayor of Surabaya, Eri Cahyadi, gave directions to Subdistrict heads and village heads to involve all stakeholders. This writing was carried out with the aim of analyzing implementation, influencing factors and what efforts have been made in implementing the Surabaya City Government policy regarding reducing stunting cases in the City of Surabaya. The writing was carried out using a qualitative method using descriptive data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study, the writing location was in the city of Surabaya with four sampling locations. The writing was carried out using theoretical references from George C. Edward (Communication, Resources, Attitudes and Bureaucratic Structure). The results of this paper show that the implementation of the Surabaya City Government's policy regarding reducing stunting cases in the city of Surabaya has gone through a good communication process with the availability of adequate resources, supported by a positive attitude from policy implementers and the availability of a bureaucratic structure which is the main reference so that the objectives of the policy can be achieved.

Keywords: Policy Implementation, Stunting Reduction, communication, Resources, bureaucratic structure

Pendahuluan

Kemiskinan menimbulkan permasalahan baru pada kesehatan warga ialah pada minimnya pemenuhan gizi pada anak yang menimbulkan stunting(bayi pendek). Permasalahan gizi stunting(bayi pendek) ialah salah satu permasalahan gizi yang krusial, khususnya di Kota Surabaya. Bagi World Health Organization (2020) stunting merupakan pendek ataupun sangat pendek bersumber pada panjang/ besar tubuh bagi umur yang kurang dari- 2 standar deviasi(SD) pada kurva perkembangan World Health Organization.

Stunting adalah permasalahan pada gizi yang kritis didunia, khususnya pada negara miskin dan berkembang karena negara berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih terbilang dalam jarak menenah atau sedang proses perkembangan. Stunting merupakan suatu tumbuh kembang yang gagal sehingga menyebabkan gangguan pada pertumbuhan balita akibat dari nutrisi yang tidak tercukupi secara terus menerus, yang dimulai dari masa kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, perkembangan mental anak terhambat, hingga terjadi kematian. Sedangkan pada balita

menyebabkan kemampuan intelektual menurun, produktivitas dan memungkinkan mengalami penyakit dimasa mendatang.

Masalah stunting dapat menghambat kondisi ekonomi dan meningkatkan kemiskinan dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Dikeluarkannya kebijakan tentang percepatan penurunan stunting ini agar kedepanya masalah stunting di Kota Surabaya dapat teratasi, yang memiliki tujuan untuk menurunkan pravelensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kemenkes RI melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia “SSGI” pada saat Rapat Kerja Nasional BKKBN mengumumkan bahwa prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menyusut secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya menggapai 28,9 persen(6.722 bayi), di 2022 signifikan menyusut sampai ke angka 4,8 persen(923 bayi). Berikutnya pada tahun 2023, per 30 juni 2023 tercatat cuma tersisa 651 bayi. Bersumber pada persentase prevalensi stunting tahun 2022, Indonesia terdapat di angka 21,6 persen, sebaliknya di Jatim 19,2 persen. Sedangkan itu Surabaya, persentase prevalensinya jadi yang sangat rendah diantara kota/ kabupaten di segala Indonesia, ialah 4,8 persen.



Gambar 1 1 Data Stunting Tahun 2020 –2022 di Kota Surabaya
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Peristiwa stunting pada anak ialah sesuatu proses kumulatif yang terjalin semenjak kehamilan, masa anak-anak serta selama siklus kehidupan. terdapat beberapa aspek yang berpengaruh pada pengimplementasian program antara lain Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu yakni komunikasi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi, faktor eksternal yang bersal dari lingkungan luar yakni faktor sosial, geografis.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya tentang penurunan stunting di Kota Surabaya dengan memberikan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait penanganan penurunan stunting.

Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya menjelaskan tujuan dari disusunnya peraturan tersebut a) Merupakan uraian serta kominten segala pemangku kepentingan terpaut kedudukan sertanya dalam percepatan penyusutan stunting di Wilayah; 2) Mengintegrasikan serta menyelaraskan program ataupun aktivitas terpaut percepatan penyusutan stunting secara terpadu buat dilaksanakan dengan terinci serta jelas buat membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik; serta 3) tingkatkan pemahaman warga serta mengganti sikap buat menghindari stunting lewat strategi komunikasi pergantian sikap yang komprehensif di Wilayah. ketiga tujuan tersebut mengantarkan kalau tujuan dibentuknya peraturan ini merupakan buat jadi acuan bawah pola komunikasi yang hendak di terapkan oleh para pelaksana kebijakan ialah Pemerintah, Warga, pihak swasta serta penerima khasiat ialah bayi stunting itu sendiri.

Tinjauan pustaka atau disebut juga tinjauan pustaka (literature review) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum, ketika atau setelah melakukan penelitian.

Peneliti ini termotivasi oleh sebagian penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan serta memperdalam kajian teori yang digunakan, dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah antara lain.

Putri Wididiati, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom (2022) dengan fokus penelitian untuk mengenali upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penindakan stunting dicoba lewat penerapan program yang sudah diresmikan hingga pada pendanaan dalam upaya penyusutan stunting. Penelitian mereka memberikan hasil bahwa implementasi

kebijakan penindakan stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren sudah berjalan dengan baik dalam penerapan program serta pendanaannya.

Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno (2022) dengan fokus menganalisis proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penanggulangan stunting, hasil penelitian bahwa Penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dikira sukses sebab pola penaggulungannya lebih menitikberatkan pada bermacam aspek supaya dapat dilaksanakan dengan baik, baik dari sisi kebijakan, pihak serta organisasi yang ikut serta serta aspek area.

Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti (2021) dengan fokus Menganalisis proses implementasi kebijakan percepatan, penangkalan serta penanggulangan stunting Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menggonakan teori Van M serta Horn, dengan hasil penelitian kalau percepatan penangkalan serta penanggulangan stunting tidak sukses dalam merendahkan permasalahan stunting di Kabupaten Bandung meski kegiatan-kegiatan penangkalan serta penanggulangan stunting sudah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif ataupun khusus disebabkan pandemi Covid- 19.

Desprita Nurkholilah (2021) dengan fokus Menganalisis proses implementasi program dorongan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Kumpeh Ulu dengan memakai teori model implementasi kebijakan Charles O. Jones yang terdiri dari 3 pilar ialah organisasi, interpretasi serta pelaksanaan supaya memandang tingkatan kesejahteraan warga penerima dorongan perumahan swadaya. Menghasilkan Kesimpulan bahwa Penerapan program stimulan perumahan swadaya dinilai standar dalam perihal keadaan rumah untuk penerima manfaat, tetapi nyaris setengah (48%) penerima manfaat masih mempunyai rumah di dasar standar serta tidak penuhi sasaran serta upaya kenaikan kesejahteraan warga penerima dorongan swadaya dalam kemudahan akses pembelajaran serta kesehatan masih kurang.

Erina Fahzira (2020) dengan fokus Menganalisis proses implementasi kebijakan penindakan stunting yang dicoba oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan teori implementasi kebijakan bagi Edward III, menghasilkan kesimpulan bahwa Penerapan kebijakan penyusutan stunting di Kabupaten Kampar belum maksimal, perihal tersebut disebabkan oleh komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang, perilaku staf masih kurang motivasi kerja serta mencermati kapasitas kerja.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, penelitian ini membahas tentang objek yang alamiah sesuai dengan apa yang telah terjadi maupun belum terjadi dilapangan (Hardani, 2020). Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya tepatnya pada Kelurahan Jeparo, Kelurahan Nyamplungan, Kelurahan Babatan dan Kelurahan Gunung Anyar. Salah satu alasan yang mendasari peneliti mengambil lokasi penelitian di lokasi tersebut adalah karena Surabaya termasuk kota terbesar nomor 2 (dua) berdasarkan luas wilayah dengan banyaknya jumlah penduduk. Dengan menggunakan pengukuran keberhasilan implemmtasi kebijakan menurut George Edward III terdapat 4 faktor yakni (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Sikap Pelaksana; dan (4) Stuktur Birokrasi.

Hasil Dan Pembahasan

Di Perlukan mekanisme kerja yang dibentuk dengan tujuan mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan, penekanan akan keharusan adanya *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan antara para pelaksana, untuk mekanisme pelaksanaan program Implementasi Penurunan stunting di kota Surabaya telah di atur dan di tuangkan dalam Peraturan Walokota Surabay Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan penurunan *stunting* di Kota Surabaya

Berdasarkan obervasi di lapangan, penulis melihat penanganan stunting telah diatur di peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Pada tahun 2022 presentase kasus stunting mengalami penurunan hingga ke angka 4.8% (923 balita) dan pada bulan Juni 2023 tercatat hanya 651 balita dan pada akhir tahun 2023 tercatat 279 kasus balita stuting.

Dari hasil pertemuan wawancara tersebut penulis dapat menarik hasil penelitan terkait implementasi kebijakan penurunan stunting yang dilakukan di 4 tempat berbeda yang didasarkan pada Teori implementasi kebijakan publik yaitu Teori Edward III. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik

implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Agustino dalam Anggara, S.(2018: 251) menerangkan kalau kebijakan yang dikomunikasikan wajib pas, akurat serta tidak berubah- ubah, supaya para pembentuk keputusan serta para implementator terus menjadi tidak berubah- ubah dalam melakukan kebijakan yang hendak diterapkan kepada warga. aktivitas komunikasi ialah proses mengantarkan program ke sasaran serta kebalikannya, hasil dari komunikasi kesepahaman, dilanjut dengan keputusan mengambil perilaku, menerima ataupun menolak program.

Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penyusutan Stunting di Kota Surabaya sudah menjabarkan tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut yakni a) tingkatkan uraian serta kominten segala pemangku kepentingan terpaut kedudukan sertanya dalam percepatan penyusutan stunting di Wilayah; 2) Mengintegrasikan serta menyelaraskan program ataupun aktivitas terpaut percepatan penyusutan stunting secara terpadu buat dilaksanakan dengan terinci serta jelas buat membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik; serta 3) tingkatkan pemahaman warga serta mengganti sikap buat menghindari stunting lewat strategi komunikasi pergantian sikap yang komprehensif di Wilayah. Tiga tujuan tersebut merupakan acuan untuk pola komunikasi yang hendak di terapkan oleh para pelaksana kebijakan ialah Pemerintah, Warga, pihak swasta serta penerima khasiat ialah bayi stunting itu sendiri.

“komunikasi kami dalam penanganan stunting dilakukan secara langsung melalui pertemuan yang diadakan setiap satu bulan sekali” (Bapak Moch. Hadi Kita selaku Kasi Kesra Kelurahan Nyamplungan) (wawancara 22 April 2024)

Bapak Moch hadi Kiat menjelaskan terdapat forum pertemuan rutin bulanan menjadi wadah komunikasi antar pelaksana agar proses komunikasi tetap terjaga dan sefrekuensi.

“komunikasi kami ditunjang dengan adanya grup whatsapp baik itu dengan pejabat pemerintah dan juga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Jadi tim TPK itu sebagai perantara antara pihak pemerintah dengan warga mbak, setiap RW sudah ada tim TPKnya sendiri. Dengan adanya bantuan TPK tersebut memudahkan kita mendapatkan informasi terkait stunting atau permasalahan lainnya mbak. Dan untuk pertemuan sendiri itu tergantung dari pimpinan ya mbak, biasanya setiap satu atau dua bulan sekali diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan stunting itu sendiri mbak.” (Bapak Dimas Enggal selaku staf kasi kesra Kelurahan Babatan) (wawancara 23 April 2024).

Bapak Dimas Enggal menyampaikan bahwa komunikasi terbentuk dengan memanfaatkan grup whatsapp yang didalamnya terdapat para pejabat pemerintah dan tim pendamping keluarga (TPK), Tim TPK itu sebagai orang luar yang menjadi perantara antara aparat pemerintah dengan warga, TPK sangat membantu memudahkan mendapatkan informasi terkait permasalahan-permasalahan di bawah. Untuk forum pertemuan pembahasan permasalahan yang ada menyesuaikan kebutuhan kadang sebulan sekali dan dua kali.

Dari informasi tersebut disimpulkan Komunikasi Intents telah terbangun dan berfungsi hal ini mengakibatkan hilangnya hambatan Transmisi karena dalam berkomunikasi tidak perlu melewati struktur birokrasi yang berlapis-lapis, sehingga kapanpun dibutuhkan komunikasi akan dapat tersampaikan dan teratasi sehingga permasalahan lebih cepat tersolusikan.

Dengan dilaksanakan fungsi komunikasi dengan baik akan berakibat berjalan efektifnya kebijakan yang baik serta jelas berkaitan dengan timbulnya perkara dilapangan , serta lewat komunikasi yang baik bisa menguatkan proses penurunan angka stunting. Serta terdapatnya komunikasi yang baik sangat menolong seluruh pihak untuk dapat menguasai segala permasalahan yang timbul, menjauhi kesalahpahaman. Hal ini menandakan komunikasi menurut teori Edward III sudah dilaksanakan dengan baik, keberhasilan komunikasi ini jadi motivasi untuk para pihak untuk meningkatkan kinerja.

Berdasar hasil penyajian data terhadap informasi seluruh aparat yang terlibat diatas dapat di katakan pengimplementasian program penurunan stunting di kota surabaya khususnya di kelurahan yang menjadi sampling penulisan variabel komunikasi telah terbangun dengan baik dan berjalan secara efektif memuaskan,

2. Sumberdaya

Agustino dalam dalam Anggara, S.(2018:252), menurut George C.Edward III sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan pemerintah adalah 1) Staff, terdapat jumlah dan berkemampuan yang sesuai kebutuhan; 2) Informasi, berkaitan tentang cara / prosedur pelaksanaan dan data yang berkaitan dengan kebijakan; dan 3) Kewenangan, kewenangan dalam menjalankan kebijakan yang diperlukan sangatlah bervariasi, dapat berwujud kewenangan dalam menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan memanfaatkan data, kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak pihak yang berpotensi dapat terlibat. Segala sumber daya dikerahkan untuk program penurunan stunting mulai dari SDM, peralatan dan lainnya seperti mengerahkan kesehatan dan tenaga gizi berikut merupakan hasil kutipan wawancara.

“terkait sumber daya khususnya SDM, kami sudah menyiapkan dan mencukupi semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program penurunan stunting, salah satunya dengan membentuk 9 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sedangkan untuk anggaran sendiri tidak semua berasal dari APBD dan untuk rincianya tidak bisa kami sebutkan.” (Bapak Sarwono P selaku Kasi Kesra Kelurahan Jepara) (wawancara 22 April 2024)

Bapak Sarwono mengatakan bahwasanya untuk indikator sumberdaya sudah berjalan sebagaimana mestinya karena untuk segi SDM sudah terpenuhi dengan terbentuknya TPK dan dari segi anggaran sudah dipersiapkan tidak hanya melalui APBD melainkan juga dari pihak swasta yang diajak kerja sama oleh kelurahan Jepara.

“dalam penanganan stunting saya sebagai kader ditunjuk untuk menjadi bagian dalam tim pendamping keluarga (TPK) di tpk itu sendiri sudah ada 3 unsur diantaranya unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keluarga Berencana (KB) dan Tenaga kesehatan.” (Ibu Maria Ulfa selaku kader kelurahan nyamplungan) (22 April 2024)

Dari penjelasan diatas bahwa dalam indikator SDM sudah terpenuhi dengan adanya kompetensi implementor dan didukung dengan pernyataan diatas. Tidak hanya kompetensi implementator saja melainkan dari segi sumber daya penunjang sarana dan prasarana sangat memadai sehingga impelmentasi kebijakan pencegahan penurunan stunting menjadi lebih optimal.

“..setiap bulanya juga kita akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan untuk personil yang membantu saya sangat banyak ya mbak, khususnya diwilayah RW saya sendiri untuk kadernya ada sekitar 10 orang mbak jadi saya dibantu oleh teman-teman juga mbak.” Ujar ibu yuni selaku kader kelurahan Babatan (23 Aptil 2024)

Ibu Yuni menjelaskan bahwa dilakukan pemberian makanan tambahan (PMT) dan terdapat personil yang mencukupi terhitung sekitar 10 orang di wilayah RW 10 serta dibantu oleh teman temannya.

Berdasar analisa melalui teknik wawancara dan pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti, maka dapat dijelaskan bahwa indikator sumber daya menurut teori Edward III berjalan dengan baik dan optimal karena semua pihak implementor terlibat dalam program penurunan stunting dan mengarahkan sumber daya yang ada untuk mendukung penurunan stunting di Kota Surabaya. Tidak hanya dari dumber daya manusia namun dari sumber daya sarana dan prasarana sangat ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan serta pemberian makanan tambahan sedangkan untuk sumber daya anggaran sendiri tersedia melalui APBD dan kerja sama dengan para investor atau pengusaha yang ada disekitar wilayah penulisan. Sebab indikator sumber daya sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan dan sangat penting untuk dilaksanakan.

3. Sikap

Sikap ialah salah satu aspek yang memiliki konsekuensi berarti untuk implementasi kebijakan yang efisien. Bila para pelaksana memiliki kecenderungan ataupun perilaku positif ataupun terdapatnya sokongan terhadap implementasi kebijakan hingga ada mungkin yang besar implementasi hendak terlaksana cocok dengan keputusan dini. Demikian kebalikannya, bila para pelaksana berlagak negatif ataupun menolak hingga implementasi kebijakan hendak mengalami hambatan yang sungguh- sungguh, sifat serta

ciri ataupun perilaku yang dipunyai oleh implementor semacam komitmen, kejujuran, watak demokratis.

“sejauh ini dalam hal penanganan stunting di kelurahan kita semua terlibat dan mengutamakan komitmen yaitu menurunkan angka stunting dan tidak ada masalah kendala karena kami mengutamakan musyawarah.” (Bapak Febry Istianto selaku staf kasi kesra Kelurahan Gunung Anyar) (wawancara 3 Mei 2024).

Ibu Wahyu selaku kader kelurahan Jepara cukup mengetahui banyak tentang program penurunan stunting dan menurut beliau program yang diadakan berjalan dengan sebagaimana mestinya, beliau diajak untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PKK Kota Surabaya tentang penurunan stunting.

“saya sangat mendukung program penurunan stunting mbak, karena di kelurahan saya yang awalnya ada 3 balita stunting dan di tahun 2024 ini alhamdulillah menjadi zero balita stunting mbak jadi program penurunan stunting yang ada sangat membantu mbak terkhusus untuk ibu balita yang kurang mampu yang anaknya termasuk balita stunting.” (Ibu Maria Ulfa selaku kader Kelurahan Nyamplungan) (wawancara 6 Mei 2024)

Ibu Maria sangat mendukung program penurunan stunting, karena memberikan manfaat yang nyata dari awalnya terdapat kasus balita stunting dan menjadi zero balita stunting, menjelaskan bahwa program ini sangat membantu keluarga balita yang kurang mampu dalam menangani balita yang terkena stunting.

Berdasar analisa melalui teknik wawancara dan pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti, dapat ditarik kesimpulan dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting di kota Surabaya khususnya di wilayah sampling untuk indikator sikap menurut teori Edward III telah di dijalankan dan difungsikan dengan baik, para pelaksana kebijakan mulai pemerintah para tenaga kesehatan dan kader memiliki sikap antusias yang tinggi untuk mencapai tujuan program penurunan kasus stunting dari kota Surabaya, hal ini merupakan salah satu penyebab suksesnya program penurunan stunting.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi ialah salah satu insitusi yang sangat kerap apalagi secara totalitas jadi pelaksana aktivitas. Keberadaan birokrasi tidak cuma dalam stuktur pemerintah, namun juga terdapat dalam organisasi swasta, institusi pembelajaran serta sebagainya. Dalam keputusan walikota surabaya nomor 79 tahun 2022 dijelaskan bahwa yang terlibat dalam penanganan stunting mulai dari pemerintah akademisi dan lainnya serta dijabarkan tugasnya di dalam sk dan apa saja yang dilakukan untuk penanganan stunting tentang struktur birokrasi.

”struktur birokrasinya sudah diatur mbak jadi sudah dibentuk sk tim perepatan penanganan penurunan stunting di tingkat kecamatan sedangkan untuk tingkat kelurahan sendiri juga suda dibentuk sk tim pendamping keluarga yang dimana anggotanya terdiri dari kader dan juga petugas kesehatan. Untuk koordinasi antar bagian kita juga terlaksana dengan baik dan untuk semua pelaksanaan kita juga sesuai dengan SOP dan perintah dari atasan mbak.” Ujar narasumber dari Kelurahan.

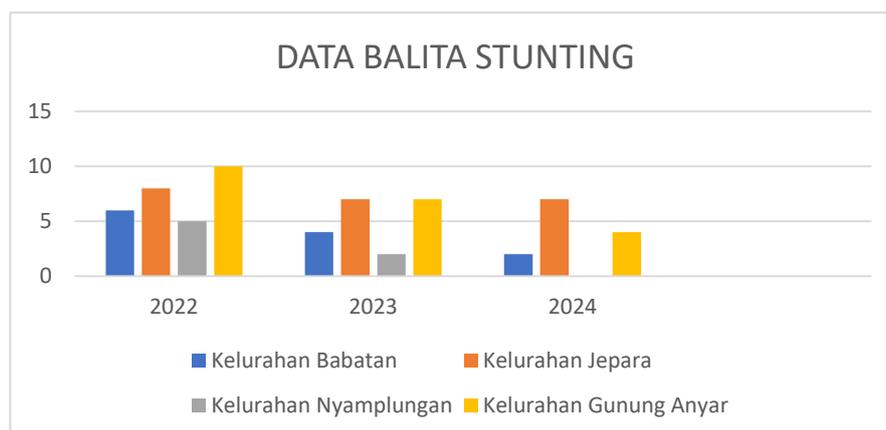
Narasumber yang merupakan aparatur pemerintah memberikan pernyataan yang sama terkait sturktur birokrasi yang dimiliki. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

“saya belum mengetahui mbak kalau di kelurahan memiliki SOP untuk penanganan penurunan stunting, tapi untuk informasi dari kelurahan ke kader itu berjalan efektif ya mbak karena adanya grup itu tadi terkait penanganan masalah pun jika kita lapor di grup akan ditanggapi cepat oleh pihak kelurahan.” Ujar ibu Yuni selaku kader kelurahan Babatan.

Menurut informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni kader kelurahan Babatan bahwa beliau tidak mengethau adanya SOP, beliau menyampaikan bahwa dari pihak kelurahan tidak meberikan sosialisasi terkait SOP yang dimiliki.

Berdasar analisa melalui teknik wawancara dan pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pada proses pengimplementasian Kebijakan penurunan stunting di kota surabaya khususnya lokasi sampling bahwa indikator struktur birokrasi menurut teori Edward III telah dilaksanakan dan berfungsi dengan baik. Dalam implementasi program unsur struktur birokrasi dalam penanganan stunting berjalan optimal karena strukturnya telah jelas dan terarah untuk mengimplementasikan kebijakan namun untuk sosialisasi kepada kader sangat kurang karena banyak kader yang tidak mengetahui tentang struktur birokrasi yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk penyampaian informasi dan respon dari kelurahan berjalan dengan efektif dan terlaksana dengan cepat menurut informasi dari narasumber yang telah diwawancarai.

Berdasar analisa melalui pengumpulan data obervasi di lapangan yang dilaksanakan peneliti, untuk pengimplementasian program penurunan stunting telah diatur dan bepedoman peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Terlihat perubahan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024, Pada tahun 2022 presentase kasus stunting mengalami penurunan hingga ke angka 4.8% (923 balita) dan pada bulan Juni 2023 tercatat hanya 651 balita dan pada akhir tahun 2023 tercatat 279 kasus balita stuting. (Pemerintah Kota Surabaya,2023)



Gambar 4 1 Grafik Balita Stunting

Penutup

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penurunan Kasus Stunting Di Kota Surabaya telah melalui proses komunikasi yang baik dengan ketersediaan sumberdaya yang cukup memadai, di dukung sikap positif dari para pelaksana kebijakan serta tersedia struktur birokrasi yang menjadi acuan utama sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Dalam implementasi kebijakan Penurunan Kasus Stunting pemerintah Kota Surabaya telah membangun Komunikasi dengan baik dan berjalan secara efektif melibatkan unsur pemerintah terdiri dari pemerintah kecamatan, Kelurahan dan tenaga kesehatan serta melibatkan masyarakat para ibu kader, untuk sumber daya pelaksana terdiri dari tenaga aparat kecamatan, aparat kelurahan, tenaga kesehatan, ibu kader, untuk sarana prasarana penunjang dengan memberikan pelayanan kesehatan pada masing masing RW serta pemberian makanan tambahan kebutuang anggaran bersumber dari APBD dan pihak luar bekerjasama dengan swasta.

Para pelaksana kebijakan mulai pemerintah para tenaga kesehatan dan kader memiliki sikap antusias yang tinggi untuk mencapai tujuan program penurunan kasus stunting di kota surabaya. Struktur birokrasi telah diatur sangat jelas dalam keputusan walikota surabaya nomor 79 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya dan telah di jadikan pedoman oleh para pelaksana secara keseluruhan dan berjalan secara optimal.

Referensi

- (BAPPENAS), B. P. (2024, Mei 5). *Pengertian upaya sensitif dan spesifik*. Diambil kembali dari <https://cegahstunting.id/intervensi/intervensi-spesifik/>
- Anggara Setya Saputra, S. S. (2022). implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Purwokerto : Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Universitas nadlatul Ulama Purwokerto*.
- Anggara, D. S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antara, K. (2023, Juli 6). Diambil kembali dari <https://www.antaranews.com/berita/3621306/wali-kota-sebut-stunting-di-surabaya-tinggal-651-balita>
- Area, L. P. (2022, Mei 31). Purposive Sampling – Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>.
- Dian Rosa Sunaryo, C. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pencerpatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Bandung : universitas Padjajaran*.
- Dr. Taufiqurakhman, S. (2014). *Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Moestopo Beragama : Jakarta.
- Endang Retno Surjaningrum, , Eldatia Utari Putri, Nur Ainy Fardana dkk. (2022). PETA POTENSI PENGENTASAN STUNTING DI KOTA SURABAYA. *PETA POTENSI PENGENTASAN STUNTING DI KOTA SURABAYA*.
- Fahzira, E. (2020). Implementasi kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar. *Skripsi : Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Gumilang, N. A. (2024, Januari 22). Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya. *Gramedia Blog*.
- Joko Pramono. S.Sos., M. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat. (2024, Mei 1). Surabaya.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (2023, Desember).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya Stunting. (2023, Desember). Surabaya.

Putri Wididiati, H. N. (2022). Implementasi kebijakan Pananganan Stunting di kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Jesa Kenek Duren Kecamatan Lenek). *Jurnal Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro*.

Rokom. (2023, Januari 25). Diambil kembali dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>